

Tax avoidance: Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen dan Sales Growth

Marchella Philia Barambula¹, Jamaluddin², Muliati¹, Andi Ainil Mufidah Tanra¹

¹Jurusan Akuntansi, Universitas Tadulako, Palu, Indonesia
marchellaphiliabarambula@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to examine and analyze the effect of institutional ownership, independent boards of commissioners, and sales growth on tax avoidance in property and real estate companies listed on the Indonesia Stock Exchange. The sample was determined using purposive sampling. The sample in this study consisted of 21 property and real estate companies listed on the Indonesia Stock Exchange during the 4-year period from 2020 to 2023. The data used is secondary data in the form of annual financial reports. The analysis method used is multiple linear analysis. The results of the study show that: (1) Institutional ownership, independent board of commissioners, and sales growth simultaneously have a significant effect on tax avoidance; (2) Institutional ownership, independent board of commissioners, and sales growth partially have a significant negative effect on tax avoidance.

Keywords: Independent Board of Commissioners, Institutional Ownership, Sales Growth, Tax Avoidance

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh kepemilikan institusional, dewan komisaris independen dan *Sales Growth* terhadap *Tax avoidance* pada perusahaan properties & real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penentuan sampel menggunakan metode purposive sampling. Sampel pada penelitian ini terdiri dari 21 perusahaan properties & real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 4 tahun yaitu 2020-2023. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa laporan keuangan tahunan. Metode analisis yang digunakan yaitu analisis linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Kepemilikan institusional, dewan komisaris independen dan *Sales Growth* secara simultan berpengaruh signifikan terhadap *Tax avoidance*; (2) Kepemilikan institusional, dewan komisaris independen dan *Sales Growth* secara parsial berpengaruh negatif signifikan terhadap *Tax avoidance*.

Kata Kunci: Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Pertumbuhan Penjualan, *Tax avoidance*

Jurnal Akun Nabelo:
Jurnal Akuntansi Netral, Akuntabel, Objektif
Volume 7/Nomor 2/Januari 2025
doi:10.11594/untad.jan.7.2.25587
Jurusan Akuntansi FEB Universitas Tadulako



A. PENDAHULUAN

Pajak merupakan kewajiban yang dibebankan kepada pemerintah oleh masyarakat dan organisasi. Pajak diwajibkan dan tunduk pada peraturan perundang-undangan. Pajak dibayarkan untuk kepentingan negara, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan tidak memberikan kompensasi langsung kepada individu. Masyarakat menerima manfaat yang dirasakan secara langsung maupun tidak langsung setelah pajak dikumpulkan dan dibayarkan kepada mereka.

Penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak merupakan penerimaan yang memiliki presentase tertinggi di banding sumber pendapatan lainnya. Rata-rata penerimaan pajak nasional menyentuh angka tujuh puluh lima persen (75%) dibandingkan dengan sumber pendapatan yang lain. Penerimaan pajak di Indonesia menunjukkan tren peningkatan yang signifikan setiap tahunnya, mencerminkan upaya pemerintah dalam memperluas basis pajak dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Namun, meskipun adanya pertumbuhan ini, tidak menutup kemungkinan terdapat risiko penghindaran pajak yang dapat mengurangi potensi penerimaan. Pajak dapat mengurangi pendapatan dan kekayaan pribadi (Moeljono, 2020) Oleh karena itu, banyak bisnis menggunakan teknik penggelapan pajak. Individu atau bisnis yang terlibat dalam penggelapan pajak dapat membahayakan efisiensi dan keadilan sistem perpajakan

*Tax avoidanc*emerujuk pada praktik yang dilakukan oleh lembaga atau perusahaan dengan cara yang legal, dimana mereka menggunakan berbagai strategi perpajakan yang dianggap relevan (Pohan, 2013). Tindakan ini sering kali melibatkan pengaturan skema transaksi yang dirancang untuk meminimalkan beban pajak yang harus dibayar. Penghindaran pajak biasanya memanfaatkan kelemahan atau celah yang terdapat dalam peraturan perpajakan, sehingga memungkinkan wajib pajak untuk mengurangi kewajiban mereka tanpa melanggar hukum. Meskipun secara teknis legal, penghindaran pajak sering kali memicu perdebatan mengenai keadilan dan integritas sistem perpajakan.

Berdasarkan berita yang dilansir dari beberapa laman di sosial media, tren penghindaran pajak hampir selalu terjadi setiap tahunnya. Penggelapan pajak diperkirakan telah merugikan Indonesia sebesar Rp68,7 triliun pada tahun 2020 (Kompas.com). Kemudian, pada tahun 2021, Menteri Keuangan mengungkapkan bahwa teknik penggelapan pajak akan menyebabkan hilangnya penerimaan pajak sekitar Rp3.360 triliun (cnnindonesia.com). Pemerintah telah memprediksi pada tahun 2023 bahwa fenomena ekonomi bayangan akan mengganggu penerimaan pajak pada tahun 2024 (Kontan.co.id). Shadow economy merupakan aktivitas perkonomian yang tidak tercatat dalam sistem resmi sehingga perusahaan atau individu cenderung tidak melaporkan pendapatan mereka dan menghindari kewajiban perpajakan.

Penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi *Tax avoidanc*telah banyak dilakukan dan memiliki hasil yang berbeda-beda. Kepemilikan institusional berperan dalam mengawasi dan mendisiplinkan manajer perusahaan. Kepemilikan ini dapat mempengaruhi keputusan penghindaran

pajak dengan mengurangi perilaku oportunistis dari manajer dan mengurangi konflik agensi. Temuan ini sejalan dengan penelitian Lestari & Ovami (2020) yang menemukan bahwa kepemilikan institusional yang signifikan dapat mencegah penghindaran pajak dengan memberikan insentif kepada manajemen untuk bertindak bijaksana. Di sisi lain, studi Sri Wahyuni tahun (2024) tidak menemukan hubungan antara kepemilikan institusional dan penghindaran pajak.

Dewan komisaris merupakan elemen lain yang mungkin terlibat dalam penggelapan pajak. Dewan komisaris bertugas memantau pelaksanaan operasional perusahaan dan memberikan nasihat kepada dewan direksi. Pengawasan dan keterbukaan pelaporan keuangan perusahaan dapat ditingkatkan melalui dewan komisaris yang kuat dan independen., sehingga mempengaruhi strategi penghindaran pajak yang diterapkan. Praktik perpajakan perusahaan harus mematuhi aturan dan tidak boleh dimanfaatkan untuk penghindaran pajak yang tidak etis. Oleh karena itu, diperlukan dewan komisaris independen. Menurut studi Astuti dkk. (2020), manajemen diizinkan untuk berpartisipasi dalam operasi penghindaran pajak sesuai hukum jika terdapat dewan komisaris independen.

Dewan komisaris independen dan kepemilikan institusional disebut oleh penulis studi ini sebagai faktor-faktor yang berkontribusi terhadap penghindaran pajak. Selain itu, mereka memasukkan pertumbuhan penjualan sebagai elemen potensial yang berkontribusi terhadap penghindaran pajak.. *Sales Growth* atau pertumbuhan penjualan yang pesat seringkali mendorong perusahaan untuk mencari cara dalam memaksimalkan pendapatan setelah pajak, yang dapat memicu penerapan strategi penghindaran pajak lebih agresif. Manajemen dapat dipaksa untuk memanfaatkan berbagai celah hukum guna menurunkan kewajiban pajak dan meningkatkan laba bersih seiring dengan peningkatan penjualan. Pertumbuhan penjualan yang signifikan akan menghasilkan laba yang tinggi, menurut Pratiwi dkk. (2021), yang akan mendorong perusahaan untuk melakukan penggelapan pajak guna menurunkan kewajiban pajak mereka.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh kepemilikan institusional, dewan komisaris independen dan *Sales Growth* terhadap *Tax avoidance* pada perusahaan properties & real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penelitian berkontribusi pada peng

B. TINJAUAN PUSTAKA

B.1 Teori Agensi

Teori keagenan menyatakan bahwa hubungan keagenan terbentuk melalui kontrak kerja antara pemegang saham dan manajemen (Jensen & Meckling, 1976). Kerangka teori yang dikenal sebagai teori keagenan mengkaji hubungan kontraktual antara dua pihak: manajemen perusahaan (agen) dan pemegang saham (prinsipal). Menurut pandangan ini, ketika prinsipal menyerahkan tanggung jawab kepada agen, hubungan keagenan pun tercipta di antara kedua pihak tersebut. Dalam konteks ini, pemegang saham biasanya

ingin agar perusahaan terus beroperasi dan memberikan imbal hasil yang tinggi atas investasi mereka, sementara manajemen cenderung menginginkan kompensasi yang lebih besar sebagai imbalan atas kinerja mereka. Teori Agensi mengemukakan bahwa konflik agensi muncul akibat perbedaan kepentingan antara pemegang saham dan manajemen

Dalam penelitian ini, teori agensi menyediakan kerangka untuk memahami bagaimana kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, dan *Sales Growth* mempengaruhi penghindaran pajak. Kepemilikan institusional dan dewan komisaris independen dapat mengurangi konflik agensi dan meningkatkan pengawasan terhadap keputusan pajak, sementara pertumbuhan penjualan dapat memotivasi manajer untuk menerapkan strategi penghindaran pajak

B.2 Tax avoidance

Tax avoidance merupakan strategi dan metode yang digunakan untuk menghindari pembayaran pajak secara aman dan sah karena tidak melanggar peraturan perpajakan (Pohan, 2013). Memanfaatkan celah dalam peraturan perpajakan merupakan metode yang digunakan dalam penghindaran pajak ini.

Penghindaran pajak sering diterapkan dengan tujuan untuk memaksimalkan pendapatan yang diterima setelah dikurangi pajak. Meskipun praktik ini sah secara hukum dan tidak melanggar peraturan perpajakan, seringkali dianggap kurang etis karena dapat dianggap sebagai eksploitasi celah-celah dalam hukum untuk menghindari kewajiban pajak yang sebenarnya lebih adil dan seharusnya dibayar. Pengukuran *Tax avoidance* merujuk pada (Sinaga & Oktaviani, 2022) sebagai berikut :

$$CETR: \frac{\text{Pembayaran Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

B.3 Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional merujuk pada kepemilikan saham perusahaan oleh entitas-entitas berbentuk lembaga seperti badan pemerintah, lembaga swasta, serta institusi domestik maupun asing (Suparlan, 2019). Kepemilikan institusional memainkan peran krusial dalam memantau, mendisiplinkan, dan memberikan dorongan untuk meningkatkan efisiensi kinerja manajerial

Meningkatnya kepemilikan institusional akan menyebabkan meningkatnya pemantauan insentif dari institusi, yang akan mengurangi konflik keagenan dan perilaku oportunistik oleh manajemen bisnis. (Sri Wahyuni, 2024). Pengukuran kepemilikan institusional merujuk pada Suwisma, dkk (2022) sebagai berikut :

$$\text{B.4 Dewan Komisaris Independen } KI: \frac{\text{Kepemilikan saham institusional}}{\text{Jumlah saham yang beredar}}$$

Dewan komisaris independen terdiri dari orang-orang yang tidak memiliki hubungan dengan manajemen perusahaan, pemegang saham utama, atau komisaris lainnya, klaim Surya dan Yustivandana (2006). Mereka dipilih untuk menjalankan fungsi pengawasan, memberi nasihat kepada manajemen, dan melindungi kepentingan pemegang saham, terutama pemegang saham minoritas.

Salah satu indikator efektivitas pelaksanaan tugas komisaris independen adalah frekuensi rapat dewan komisaris. Semakin sering rapat dilakukan, maka semakin besar peluang bagi komisaris untuk memantau dan mengevaluasi aktivitas manajerial secara menyeluruh. Pengukuran independensi dewan komisaris mengacu pada (Ulhaq & Fadjarenie, 2021) dengan rumus sebagai berikut:

B . 5 *DKI: Frekuensi Rapat Dewan Komisaris Independen*

Sales Growth

Sales Growth mengacu pada perubahan dalam total penjualan perusahaan dari satu periode ke periode lainnya. *Sales Growth* mencakup peningkatan jumlah unit yang terjual atau peningkatan nilai total penjualan. Tingkat pertumbuhan penjualan yang positif menunjukkan bahwa perusahaan berhasil menarik lebih banyak pelanggan atau meningkatkan penjualannya kepada pelanggan, yang merupakan tanda kesehatan bisnis yang baik (Maryanti, 2016).

Manajemen dapat menggunakan data pertumbuhan penjualan untuk menginformasikan strategi perusahaan dan pengambilan keputusan analisis tren penjualan. Ukuran lain daya saing perusahaan di pasar adalah pertumbuhan penjualan. Perusahaan dengan pertumbuhan penjualan yang lebih tinggi biasanya memiliki posisi yang lebih dominan di pasar. Untuk menentukan pertumbuhan penjualan, konsultasikan dengan (Nadya & Purnamasari, 2020) dengan rumus sebagai berikut:

Dengan demikian, penelitian ini menduga bahwa:

$$\text{Sales Growth} = \frac{\text{Penjualan}(t) - \text{Penjualan}(t-1)}{\text{Penjualan}(t-1)}$$

H₁: Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris, dan Sales Growth berinteraksi positif pada Tax Avoidance.

H₂: Kepemilikan Institusional berinteraksi positif pada Tax Avoidance.

H₃: Dewan Komisaris berinteraksi positif pada Tax Avoidance.

H₄: Sales Growth berinteraksi positif pada Tax Avoidance.

C. METODE PENELITIAN

Objek dalam penelitian ini adalah Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen, dan *Sales Growth* sebagai variabel independen, sedangkan *Tax avoidance* sebagai variabel dependennya, yang difokuskan pada perusahaan-perusahaan properties & real estate. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan verikatif.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder. Data sekunder merupakan sumber data yang dikumpulkan secara tidak langsung oleh peneliti melalui perantara Data sekunder yang digunakan berupa data laporan keuangan yang di unggah ke situs resmi Bursa Efek Indonesia sektor properties & real estate tahun 2020-2023.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan merekap data laporan keuangan tahunan perusahaan properties & real estate yang berkaitan dengan variabel penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan properties & real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2020-2023. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 21 perusahaan. teknik pengambilan sampel yang dilakukan adalah teknik *purposive sampling*. Adapun kriteria dalam menentukan sampel yaitu sebagai berikut :

1. Perusahaan properties & real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2023
2. Perusahaan properties & real estate yang mempublikasikan laporan keuangan tahunan periode 2020-2023.

Perusahaan properties & real estate yang selama periode pengamatan tidak mengalami kerugian

D. HASIL

Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif merupakan uji analisis data yang digunakan untuk menggambarkan data dari masing-masing variabel penelitian. Untuk memberikan gambarn data dari keseluruhan pengamatan atas sampel penelitian, berikut disajikan tabel statistik deskriptif yang meliputi nilai rata-rata (mean), minimum, maksimum dan standar deviasi dari masing-masing variabel dalam penelitian ini. Hasil pengujian statistik deskriptif dapat dilihat pada tabel 1 sebagai berikut :

Tabel 1.
Hasil Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
KPI	67	.1193	.9662	.678714	.1935852
DKI	67	3.0000	8.0000	5.552239	1.1319544
SG	67	-.7480	.6264	.019322	.2871814
TAX AVOIDANCE	67	.0003	.5646	.188289	.1556722
Valid N (listwise)	67				

Sumber: Output IBM SPSS Statistics 25, 2025

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif yang disajikan pada tabel 1, *Tax avoidance* memiliki nilai minimum sebesar 0,0003 dan nilai maksimum sebesar 0,5646. Adapun nilai rata-rata yang diperoleh yaitu sebesar 0,188289 dan nilai standar deviasi sebesar 0,1556722.

Kepemilikan institusional memiliki nilai minimum sebesar 0,1193 dan nilai maksimum sebesar 0,9662. Adapun nilai rata-rata yang diperoleh yaitu sebesar 0,678714 dan nilai standar deviasi sebesar 0,1935852.

Dewan komisaris independen memiliki nilai minimum sebesar 3 dan nilai maksimum sebesar 8. Adapun nilai rata-rata yang diperoleh yaitu sebesar 5,552239 dan nilai standar deviasi sebesar 1,1319544.

Sales Growth memiliki nilai minimum sebesar -0,7480 dan nilai maksimum sebesar 0,6264. Adapun nilai rata-rata yang diperoleh yaitu sebesar 0,019322 dan nilai standar deviasi sebesar 0,2871814.

Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah pada suatu model regresi suatu variabel independen dan variabel dependen ataupun keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak normal. Model regresi dikatakan berdistribusi normal menggunakan uji *one sample kolmogorov smirnov* apabila nilai *Asymp. Sig > 0,05*.

Tabel 2.
Hasil Uji One sample K-S Sebelum Uji Outlier

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		84
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.82343041
Most Extreme Differences	Absolute	.229
	Positive	.229
	Negative	-.184
Test Statistic		.229
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c		.001

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber: Output IBM SPSS Statistics 25, 2025

Berdasarkan hasil pengujian menggunakan one sample kolmogorov smirnov yang terdapat pada tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa model regresi asumsi normalitas belum terpenuhi dan data dikatakan belum berdistribusi

normal karena nilai Asymp. Sig. (2-tailed) lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,001 < 0,05.

Untuk menormalkan data tersebut, salah satu alternatif yang dapat dilakukan adalah dengan menghilangkan outlier sehingga data tersebut dapat mendekati nilai rata-ratanya. Data outlier adalah data dengan karakteristik unik yang terlihat berbeda dan jauh dari observasi sehingga muncul dalam bentuk nilai yang ekstrim (Ghozali, 2018).

Setelah ditemukan data outlier, sebanyak 17 data ekstrim dihilangkan agar data menjadi normal. Dengan demikian, jumlah data observasi yang digunakan dalam penelitian ini semula 84 data menjadi 67 data setelah data outlier dihilangkan. Berikut adalah hasil pengujian normalitas setelah data outlier dihilangkan:

Tabel 3.
 Hasil Uji One sample K-S Setelah Uji Outlier

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		67
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.13760501
Most Extreme Differences	Absolute	.051
	Positive	.047
	Negative	-.051
Test Statistic		.051
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c		.200 ^d

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber: Output IBM SPSS Statistics 25, 2025

Berdasarkan hasil pengujian menggunakan *one sample kolmogorov smirnov* setelah menghilangkan data *outlier*, dapat disimpulkan bahwa model regresi asumsi normalitas telah terpenuhi dan data dapat dikatakan terdistribusi normal karena nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* lebih besar dari 0,05 yaitu 0,200 > 0,05.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel independen atau variabel bebas. Jika ada korelasi yang tinggi diantara variabel-variabel independen, maka hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen menjadi terganggu. Untuk menemukan terdapat atau tidaknya multikolinearitas pada model regresi dapat diketahui dari nilai *tolerance* dan nilai *variance inflation factor* (VIF). Jika nilai *tolerance* > 0,10 dan nilai VIF < 10, maka tidak

menunjukkan adanya kolinearitas yang tinggi. Hasil uji multikolinearitas dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 4.
Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

Model		Collinearity Tolerance	Statistics VIF
1	(Constant)		
	KPI	.960	1.041
	DKI	.943	1.060
	SG	.980	1.020

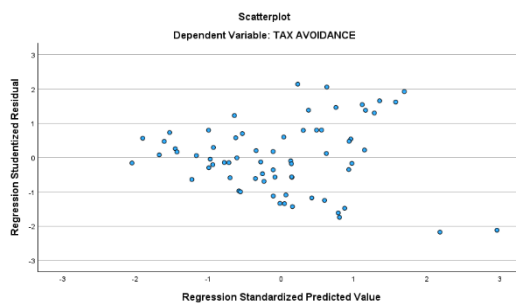
a. Dependent Variable: *TAX AVOIDANCE*

Sumber: Output IBM SPSS Statistics 25, 2025

Berdasarkan tabel 4.4 diatas diketahui bahwa untuk varibel kepemilikan institusional memiliki nilai tolerance sebesar 0,960 dan VIF sebesar 1,041, variabel dewan komisaris independen memiliki nilai tolerance sebesar 0,943 dan VIF sebesar 1,060 dan *Sales Growth* memiliki nilai tolerance 0,980 dan VIF sebesar 1,020. Hasil pengujian menunjukkan bahwa ketiga variabel bebas memiliki nilai toleran > 0,10. Hal yang sama ditunjukkan oleh nilai VIF, dimana ketiga variabel bebas juga memiliki nilai VIF < 10,00. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolinearitas antara variabel bebas sehingga model regresi layak digunakan.

Uji Heterokedastisitas

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual atau satu pengamatan ke pengamatan yang lain maka disebut homoskedastisitas dan jika varians berbeda maka disebut heterokedastisitas. Gejala heterokedastisitas dalam penelitian ini dideteksi dengan menggunakan grafik scatterplot apabila tidak ada pola tertentu serta titik-titik menyebar ke atas dan di bawah sumbu Y, maka tidak terjadi heterokedastisitas. Berikut adalah hasil pengujian heterokedastisitas :



Gambar 1. Hasil Uji Heterokedastisitas

Berdasarkan grafik scatterplot di atas menunjukkan bahwa titik-titik menyebar secara acak, serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y, hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi layak digunakan

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan untuk menguji apakah model regresi ada korelasi di antara anggota-anggota sampel penelitian yang diurutkan berdasarkan waktu sebelumnya. Untuk mendeteksi terdapat atau tidaknya autokorelasi adalah dengan melakukan uji Durbin Watson. Model regresi dinyatakan tidak ada autokorelasi positif atau negatif jika $dU < DW < 4 - dU$, dimana nilai dU ditentukan melalui tabel DW dengan signifikansi 0,05.

Tabel 5.
Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.468 ^a	.219	.181	.1408432	1.703

a. Predictors: (Constant), SG, KPI, DKI

b. Dependent Variable: *TAX AVOIDANCE*

Sumber: Output IBM SPSS Statistics 25, 2025

Berdasarkan tabel berikut, menunjukkan nilai DW sebesar 1,703. Langkah selanjutnya adalah menentukan nilai dLow (dL) dan dUp (dU) dengan melihat tabel DW pada $\alpha = 5\%$, jumlah sampel (n) = 67 dan jumlah variabel independen (k) = 3, maka dalam tabel DW menunjukkan nilai dL = 1,5122 dan nilai dU = 1,6988. Hasil $4 - dU = 4 - 1,6988 = 2,3012$ syarat tidak terjadinya autokorelasi adalah nilai $dU < DW < 4 - dU$ yang berarti $1,6988 < 1,703 < 2,3012$. Melalui hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi korelasi sehingga tidak terjadi autokorelasi.

Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linear berganda dilakukan untuk menunjukkan seberapa besar pengaruh kepemilikan institusional, dewan komisaris independen dan *Sales Growth* terhadap *Tax avoidance* pada perusahaan properties & real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Regresi linear berganda berfungsi untuk menganalisis hasil pengujian menggunakan analisis regresi berganda dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6.
Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients B	Std. Error	Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
1	(Constant)	.591	.118		4.993	<.001
	KPI	-.257	.091	-.319	-2.807	.007
	DKI	-.041	.016	-.295	-2.575	.012
	SG	-.165	.061	-.305	-2.712	.009

a. Dependent Variable: *TAX AVOIDANCE*

Sumber: Output IBM SPSS Statistics 25, 2025

Berdasarkan nilai-nilai koefisien regresi yang diperoleh dari hasil analisis regresi linear berganda diatas, selanjutnya dimasukkan ke dalam model persamaan regresi berganda dengan formulasi sebagai berikut:

$$Y = 0,591 - 0,257 - 0,041 - 0,165 + \epsilon$$

Uji F (Uji Simultan)

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah ada pengaruh secara bersama-sama antara variabel-variabel independen (kepemilikan institusional, dewan komisaris independen dan *Sales Growth*) terhadap variabel dependen (*Tax avoidance*). Hasil uji simultan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 7.
Hasil Uji F (Uji Simultan)

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.350	3	.117	5.877	.001 ^b
	Residual	1.250	63	.020		
	Total	1.599	66			

a. Dependent Variable: *TAX AVOIDANCE*

b. Predictors: (Constant), SG, KPI, DKI

Sumber: Output IBM SPSS Statistics 25, 2025

Berdasarkan hasil uji ANOVA diperoleh Fhitung sebesar 5,877 dengan nilai signifikansi sebesar 0,001. Nilai Fhitung sebesar 5,877 > Ftabel sebesar 2,74 dan tingkat signifikan lebih kecil dari taraf kepercayaan 5% (0,001 < 0,05). Dengan demikian, nilai tersebut memberikan arti bahwa secara simultan variabel kepemilikan institusional, dewan komisaris independen dan *Sales*

Growth berpengaruh signifikan terhadap *Tax avoidance*. Oleh karena itu dapat di simpulkan bahwa H1 yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional, dewan komisaris independen dan *Sales Growth* secara simultan berpengaruh signifikan terhadap *Tax avoidance* diterima.

Uji T (Uji Parsial)

Uji T digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen. Hasil uji parsial dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 8.
Hasil Uji T (Uji Parsial)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.
		B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	.591	.118			4.993	<.001
	KPI	-.257	.091	-.319		-2.807	.007
	DKI	-.041	.016	-.295		-2.575	.012
	SG	-.165	.061	-.305		-2.712	.009

a. Dependent Variable: *TAX AVOIDANCE*

Sumber: Output IBM SPSS Statistics 25, 2025

Berikut hasil uji T dari tiga variabel independen yang dimasukkan dalam model regresi dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kepemilikan institusional memiliki thitung bertanda negatif dan lebih besar dari ttabel ($2,807 > 1,669$) dan tingkat signifikan t lebih kecil dari taraf kepercayaan 5% ($0,007 < 0,05$). Dengan demikian, nilai tersebut memberikan arti bahwa variabel kepemilikan institusional secara parsial berpengaruh negatif signifikan terhadap *Tax avoidance*.
2. Dewan komisaris independen memiliki thitung bertanda negatif dan lebih besar dari ttabel ($2,575 < 1,669$) dan tingkat signifikan t lebih kecil dari taraf kepercayaan 5% ($0,012 > 0,05$). Dengan demikian, nilai tersebut memberikan arti bahwa variabel dewan komisaris independen secara parsial berpengaruh negatif signifikan terhadap *Tax avoidance*.
3. *Sales Growth* memiliki thitung bertanda negatif dan lebih besar dari ttabel ($2,712 > 1,667$) dan tingkat signifikan t lebih kecil dari taraf kepercayaan 5% ($0,009 < 0,05$). Dengan demikian, nilai tersebut memberikan arti bahwa variabel *Sales Growth* secara parsial berpengaruh negatif signifikan terhadap *Tax avoidance*.

E. PEMBAHASAN

Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap *Tax avoidance*

Kepemilikan institusional adalah kondisi di mana saham suatu perusahaan dimiliki oleh lembaga atau institusi. Kehadiran institusi sebagai pemegang

saham diyakini dapat memperkuat mekanisme pengawasan terhadap manajemen, karena institusi umumnya memiliki sumber daya, pengetahuan, serta kepentingan ekonomi yang besar untuk memastikan perusahaan dikelola dengan baik. Menurut Al-Fayoumi, dkk. (2010) kepemilikan institusional yang berada pada angka 45% pada perusahaan non-keuangan tergolong relatif tinggi dan memiliki pengaruh positif terhadap efektivitas pengawasan manajerial.

Pada penelitian ini, ditemukan bahwa kepemilikan institusional memiliki arah yang berbeda terhadap *Tax avoidance*. Temuan ini mengindikasikan bahwa perusahaan pada sektor properti dan real estate selama periode 2020–2023 cenderung melakukan praktik penghindaran pajak yang lebih rendah seiring dengan meningkatnya tingkat kepemilikan institusional.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori agensi, di mana kehadiran institusi sebagai pemegang saham yang dominan berfungsi untuk mengurangi konflik keagenan, karena institusi memiliki kekuatan dan insentif untuk melakukan pengawasan yang lebih efektif terhadap kebijakan dan keputusan manajemen. Investor institusional cenderung memiliki kepentingan terhadap keberlanjutan dan kinerja jangka panjang perusahaan. Oleh karena itu, mereka memiliki dorongan untuk menekan tindakan manajemen yang oportunistik, termasuk praktik penghindaran pajak (*Tax avoidance*) yang dapat merugikan perusahaan dalam jangka panjang. Dalam konteks ini, kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap *Tax avoidance* karena semakin besar proporsi institusi yang terlibat dalam kepemilikan saham, semakin kuat pula pengawasan terhadap manajemen agar menjalankan aktivitas yang transparan dan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Astuti, dkk (2020) dan penelitian Pramaiswari & Fidiana (2022) yang menunjukkan bahwa kepemilikan institusional secara parsial berpengaruh negatif terhadap *Tax avoidance*. Penelitian-penelitian ini menjelaskan bahwa perusahaan yang memiliki kepemilikan institusional yang tinggi akan mudah mencegah manajemen melakukan praktik *Tax avoidance*. Namun, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Moeljono (2020) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional secara parsial tidak berpengaruh terhadap *Tax avoidance*.

Pengaruh Dewan Komisaris Independen Terhadap *Tax avoidance*

Dewan komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan dan tidak memiliki hubungan langsung dengan perusahaan sehingga diharapkan mampu bertindak objektif dalam menjalankan fungsi pengawasan (Surya & Yustivandana, 2016). Dengan peran pengawasan yang jelas, dewan komisaris independen berfungsi untuk memastikan bahwa manajemen bertindak dengan integritas dan tidak bertentangan dengan kepentingan pemegang saham.

Frekuensi rapat dewan komisaris menjadi indikator penting untuk mengukur sejauh mana komisaris independen menjalankan fungsi pengawasan. Semakin sering rapat dilakukan, maka semakin besar kesempatan bagi komisaris independen untuk mengawasi, mengevaluasi, dan memberikan arahan kepada manajemen (Restria & Cahyonowati, 2014). Rapat

Dewan Komisaris umumnya dilaksanakan paling sedikit sekali setiap dua bulan, atau setidaknya empat kali setahun, sesuai ketentuan dalam Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 yang berlaku untuk emiten dan perusahaan publik, serta Pedoman Tata Tertib Dewan Komisaris yang mengatur mekanisme pengawasan berkala. Apabila jumlah rapat tahunan kurang dari empat kali, maka frekuensi tersebut dapat dikategorikan rendah, karena kurang mencukupi dalam mendukung pemantauan rutin atas kinerja dan kepatuhan perusahaan

Pada penelitian ini, ditemukan bahwa dewan komisaris independen memiliki arah yang berbeda terhadap *Tax avoidance*. Temuan ini mengindikasikan bahwa perusahaan pada sektor properti dan real estate selama periode 2020–2023 cenderung melakukan praktik penghindaran pajak yang lebih rendah seiring dengan meningkatnya tingkat dewan komisaris independen.

Hasil ini sejalan dengan teori agensi, di mana kehadiran dewan komisaris independen yang aktif, dengan frekuensi rapat yang tinggi, berfungsi sebagai mekanisme pengawasan yang independen dan objektif untuk menekan perilaku oportunistik manajemen, termasuk dalam praktik *Tax avoidance*. Komisaris independen yang tidak memiliki keterkaitan langsung dengan pemegang saham mayoritas atau manajemen memiliki insentif yang lebih kuat untuk bertindak demi kepentingan perusahaan secara keseluruhan. Rapat yang lebih sering memungkinkan dewan untuk memantau lebih dekat keputusan strategis manajemen, mengevaluasi kebijakan perpajakan yang diambil, serta memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Dalam konteks ini, dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *Tax avoidance*, karena keberadaan dan keterlibatan aktif mereka meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta menurunkan toleransi terhadap praktik penghindaran pajak yang berisiko dan tidak etis. Oleh karena itu, struktur dewan yang independen dan intensitas rapat yang tinggi menjadi indikator penting dalam mencerminkan kualitas tata kelola perusahaan yang kuat..

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lestari & Ovami (2020) dan Rohmatun (2024) yang menunjukkan bahwa dewan komisaris independen secara parsial berpengaruh negatif terhadap *Tax avoidance*. Penelitian-penelitian ini menyatakan bahwa semakin banyak rapat dan keterlibatan dewan komisaris independen, semakin rendah praktik penghindaran pajak. Namun, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pramaiswari & Fidiana (2022) dan Puspita & Febrianti (2017) yang menunjukkan bahwa dewan komisaris independen secara parsial tidak berpengaruh terhadap *Tax avoidance*.

Pengaruh Sales Growth Terhadap Tax avoidance

Sales Growth atau pertumbuhan penjualan adalah indikator yang menunjukkan sejauh mana perusahaan mampu meningkatkan pendapatan dari kegiatan operasionalnya dibandingkan dengan periode sebelumnya (Silvia, 2017). Pertumbuhan penjualan yang tinggi mencerminkan kondisi perusahaan yang berkembang dan memiliki prospek bisnis yang baik (Wahyuni & Wahyudi, 2021). Perusahaan dengan pertumbuhan penjualan yang tinggi biasanya menghadapi kebutuhan modal kerja yang lebih besar, kebutuhan investasi,

atau pengembangan kapasitas produksi. Dalam kondisi seperti ini, perusahaan cenderung mencari cara untuk mempertahankan arus kas, salah satunya dengan mengurangi beban pajak melalui praktik *Tax avoidance*.

Pada penelitian ini, ditemukan bahwa *Sales Growth* memiliki arah yang berbeda terhadap *Tax avoidance*. Temuan ini mengindikasikan bahwa perusahaan pada sektor properti dan real estate selama periode 2020–2023 cenderung melakukan praktik penghindaran pajak yang lebih rendah seiring dengan meningkatnya tingkat *Sales Growth*.

Hasil ini sejalan dengan teori agensi, di mana pertumbuhan penjualan yang tinggi membuat manajemen berada di bawah tekanan untuk terus mempertahankan kinerja yang positif, memenuhi target ekspansi, dan menjaga stabilitas arus kas. Dalam konteks ini, manajemen justru cenderung lebih berhati-hati dalam mengelola strategi perpajakan karena kesadaran akan pentingnya reputasi, kepatuhan terhadap regulasi, dan keberlangsungan bisnis jangka panjang. Oleh karena itu, dalam kerangka teori agensi, *Sales Growth* berpengaruh negatif terhadap *Tax avoidance*, karena manajemen lebih terdorong untuk bertindak secara hati-hati dan akuntabel guna mempertahankan kepercayaan investor pemangku kepentingan yang lain.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Irawan & Julfizar (2023) dan Pratiwi, dkk (2021) yang menyatakan bahwa *Sales Growth* secara parsial berpengaruh negative terhadap *Tax avoidance*. Namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mahdiana & Amin (2020) dan Praystya & Anggrainie (2024) yang menyatakan bahwa *Sales Growth* tidak berpengaruh terhadap *Tax avoidance*.

F. PENUTUP

Dalam menguji dan menganalisis pengaruh kepemilikan institusional, dewan komisaris independen dan *Sales Growth* terhadap *Tax avoidance* pada perusahaan properties & real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Maka ditemukan bahwa (1) Kepemilikan institusional, dewan komisaris independen dan *Sales Growth* secara simultan berpengaruh terhadap *Tax avoidance* pada perusahaan properties & real estate yang terdaftar di BEI tahun 2020-2023. (2) Kepemilikan institusional secara parsial berpengaruh negatif terhadap *Tax avoidance* pada perusahaan properties & real estate yang terdaftar di BEI tahun 2020-2023. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kepemilikan institusional suatu perusahaan maka semakin rendah *Tax avoidance*. (3) Dewan komisaris independen secara parsial berpengaruh negatif terhadap *Tax avoidance* pada perusahaan properties & real estate yang terdaftar di BEI tahun 2020-2023. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi dewan komisaris independen suatu perusahaan maka semakin rendah *Tax avoidance*. (4) *Sales Growth* secara parsial berpengaruh negatif terhadap *Tax avoidance* pada perusahaan properties & real estate yang terdaftar di BEI tahun 2020-2023. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi *Sales Growth* suatu perusahaan maka semakin rendah *Tax avoidance*.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penelitian merekomendasikan (1) Perusahaan untuk memastikan keterlibatan yang lebih

aktif dan perlu memberikan banyak ruang untuk terlibat dalam pengawasan yang berfokus pada kepatuhan pajak dan praktik tata kelola perusahaan, dan (2) penelitian selanjutnya, diharapkan untuk menambah jumlah variabel control yang mungkin dapat mempengaruhi *Tax avoidance* dan lakukan penelitian dengan periode waktu yang lebih panjang untuk menangkap dinamika perubahan dalam praktik *Tax avoidance*. Sehingga keterbatasan dalam penelitian yang meliputi pendekatan yang digunakan bersifat kuantitatif sehingga tidak mengkaji secara mendalam aspek kualitatif, serta penelitian ini tidak mempertimbangkan variabel kontrol lain yang berpotensi memengaruhi hasil sehingga dapat membatasi generalisasi temuan dapat teratasi dengan temuan yang komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Fayoumi, N., Abuzayed, B., & Alexander, D. (2010). Ownership structure and earnings management in emerging markets: The case of Jordan. *International Research Journal of Finance and Economics*, 38(1), 28–47.
- Astuti, D. F., Dewi, R. R., & Fajri, R. N. (2020). Pengaruh Corporate Governance dan *Sales Growth* terhadap *Tax avoidance* di Bursa Efek Indonesia (BEI) 2014-2018. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 4(1), 210. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v4i1.101>
- Budiman, J., & Setiyono. (2012). Pengaruh Karakter Eksekutif Terhadap Penghindaran Pajak (*Tax avoidance*). *Jurnal Ekonomika dan Bisnis*, 3(12)
- CNNIndonesia.com. (2021, 13 September). Pajak global bisa raib Rp3.360 T negara penghindaran pajak. *CNNIndonesia.com*. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210913194843-532-693711/pajak-global-bisa-raib-rp3360-t-gegara-penghindaran-pajak>
- Dyreng, S. D., Hanlon, M., & Mydew, E. L. 2010. The Effect of Executives on Corporate *Tax avoidance*. *The Accounting Review*. 85:1163-1189.
- Ghozali, Imam. (2018). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS25. *Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro*.
- Hermawan, R., & Aryati, T. (2022). Pengaruh Financial Distress Dan Corporate Governance Terhadap *Tax avoidance*. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 2(2), 381–394. <https://doi.org/10.25105/jet.v2i2.14138>
- Iqbal, M., Hartanto, A., & Sukmawati, D. (2022). Pegaaruh *Deferred Tax Expense*, *Capital Intensity*, dan Kepemilikan Institusional Terhadap *Tax avoidance* (Studi Pada Perusahaan Subsektor *Non-Cyclicals* yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017–2021). *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, 7(2), 112–125.
- Irawan, A., & Julfizar. (2023). Pengaruh *Sales Growth* Terhadap *Tax avoidance* Pada Perusahaan *Food And Beverage* Tahun 2018-2021. *STIPRO : Jurnal Ilmiah SP Stindo Profesional*, 9(5), 2775-3271
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial*

- Economics*, 4, 305–360. <http://ssrn.com/abstract=94043> Electronic copy available at: <http://ssrn.com/abstract=94043> <http://hupress.harvard.edu/catalog/JENTHF.html>
- Kompas.com. (2020, 23 November). RI diperkirakan rugi Rp 68,7 triliun akibat penghindaran pajak. *Kompas.com*. <https://money.kompas.com/read/2020/11/23/183000126/ri-diperkirakan-rugi-rp-68-7-triliun-akibat-penghindaran-pajak>
- Kontan.co.id. (2023, 6 Desember). Pemerintah sebut penerimaan pajak tahun 2024 dihantui fenomena shadow economy. *Kontan.co.id*. <https://nasional.kontan.co.id/news/pemerintah-sebut-penerimaan-pajak-tahun-2024-dihantui-fenomena-shadow-economy>
- Lestari, H. T., & Ovami, D. C. (2020). Pengaruh Corporate Governance Terhadap *Tax avoidance* Pada Perusahaan Asuransi di Indonesia. *Journal of Trends Economics and Accounting Research*, 1(1), 1–6. <https://journal.fkpt.org/index.php/jtear/article/view/50>
- Mahdiana, M. Q., & Amin, M. N. (2020). Perusahaan, Dan *Sales Growth* Terhadap Tax. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 7(1), 127–138.
- Maryanti, E. (2016). Analisis *Profitabilitas*, Pertumbuhan Perusahaan, Pertumbuhan Penjualan dan Struktur Aktiva terhadap Struktur Modal pada Perusahaan Sektor Industri Barang *Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 1(2), 143–151. <https://journals.ums.ac.id/index.php/reaksi/article/view/2730> <https://journals.ums.ac.id/index.php/reaksi/article/viewFile/2730/1773>
- Moeljono, M. (2020). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak. *Jurnal Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*, 5(1), 103–121. <https://doi.org/10.33633/jpeb.v5i1.2645>
- Nadya, B., & Purnamasari, D. (2020). The Effect of *Sales Growth* and *Leverage* on *Tax avoidance* Empirical Study of Coal Sub-Sector Mining Companies Listed on the Indonesia Stock Exchange in 2014–2018. *Jurnal AKSI (Akuntansi Dan Sistem Informasi)*, 5(2), 89–95. <https://doi.org/10.32486/aksi.v5i2.538>
- Pohan, Chairil Anwar. 2013, *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Pramaiswari, G. A., & Fidiana, F. (2022). Pengaruh *Profitabilitas*, Capital Intensity Dan Corporate Governance Terhadap *Tax avoidance*. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan (JIAKu)*, 1(2), 103–119. <https://doi.org/10.24034/jiaku.v1i2.5338>
- Pratiwi, N. P. D., Mahaputra, I. N. K. A., & Sudiartana, I. M. (2021). Pengaruh financial distress, *leverage*, dan *Sales Growth* terhadap *Tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2016–2018. *Skripsi-2021*, 2(1), 202–211. <https://e-journal.unmas.ac.id/index.php/karma/article/view/3740/2836>